



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Proyek Strategis Nasional dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dan skala prioritas yang mempertimbangkan kebutuhan, kemanfaatan, dan daya dukung atas kelancaran Proyek Strategis Nasional, serta konektivitas antarinfrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi, sehingga pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menjadi tepat sasaran dalam mewujudkan tercapainya pertumbuhan perekonomian nasional yang meningkat dan stabil, serta terealisasinya secara konkret pemerataan hasil pembangunan nasional ke seluruh lapisan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan evaluasi atas usulan dan daftar Proyek Strategis Nasional untuk selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan kelayakan suatu Proyek Strategis Nasional di dalam daftar Proyek Strategis Nasional atau menetapkan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional setelah mendapat persetujuan dari Presiden;

- c. bahwa penetapan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b memerlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sehingga daftar Proyek Strategis Nasional memiliki daya laku dan daya ikat yang kuat untuk dijadikan dasar acuan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional dan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

- Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 7. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
 8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Menetapkan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional.
- (2) Daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pasal 2

Perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2021

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA;

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1034

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Kiut Hadi Priatna
NIP. 197403071999031002

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
 PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS
 NASIONAL

PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL

I. PROYEK

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
A. Sektor Jalan dan Jembatan		
1.	Jalan Tol Serang - Panimbang	Provinsi Banten
2.	Jalan Tol Pandaan - Malang	Provinsi Jawa Timur
3.	Jalan Tol Manado - Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
4.	Jalan Tol Balikpapan - Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur
5.	Jalan Tol Medan - Binjai - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
6.	Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Riau
7.	Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
8.	Jalan Tol Sigli - Banda Aceh - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Aceh
9.	Jalan Tol Binjai - Langsa - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Aceh dan Sumatera Utara
10.	Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Barat
11.	Jalan Tol Rantau Prapat - Kisaran - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
12.	Jalan Tol Langsa - Lhokseumawe - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Aceh
13.	Jalan Tol Lhokseumawe - Sigli - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Aceh

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
14.	Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau
15.	Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
16.	Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan
17.	Jalan Tol Jambi - Rengat - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Jambi dan Riau
18.	Jalan Tol Rengat - Pekanbaru - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Riau
19.	Jalan Tol Dumai - Sp. Sigambal - Rantau Prapat - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara
20.	Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
21.	Jalan Tol Muara Enim - Lubuk Linggau - Lahat - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
22.	Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
23.	Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung	Provinsi Sumatera Selatan
24.	Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan	Provinsi Jawa Barat
25.	Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang - Padalarang	Provinsi Jawa Barat
26.	Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran	Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Provinsi Banten
27.	Jalan Tol Serpong - Cinere	Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat
28.	Jalan Tol Cinere - Jagorawi	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
29.	Jalan Tol Cimanggis - Cibitung	Provinsi Jawa Barat
30.	Jalan Tol Cibitung - Cilincing	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
31.	Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
32.	Jalan Tol Serpong - Balaraja	Provinsi Banten

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
33.	Jalan Tol Semanan - Sunter - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
34.	Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
35.	Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
36.	Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
37.	Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
38.	Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
39.	Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo	Provinsi Jawa Timur
40.	Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi	Provinsi Jawa Timur
41.	Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar	Provinsi Jawa Timur
42.	Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
43.	Jalan Tol Semarang - Demak	Provinsi Jawa Tengah
44.	Jalan Tol Yogyakarta - Bawen	Provinsi Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
45.	Pembangunan <i>Fly Over</i> dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong	Provinsi Jawa Timur
46.	Penambahan Lingkup Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri	Provinsi Jawa Timur
47.	Penambahan Lingkup Jalan Tol Depok - Antasari	Provinsi Jawa Barat
48.	Penambahan Lingkup Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo	Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta
49.	Penambahan Lingkup Jalan Tol Bogor <i>Ring Road</i>	Provinsi Jawa Barat
50.	Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap	Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah
51.	Jalan Tol Semarang <i>Harbour</i>	Provinsi Jawa Tengah
52.	Jalan Tol Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar (Mamminasata)	Provinsi Sulawesi Selatan
53.	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Provinsi Jawa Barat

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
54.	Pembangunan Jalan Tol Samarinda - Bontang	Provinsi Kalimantan Timur
55.	Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk - Negara - Pekutatan - Soka - Mengwi	Provinsi Bali
56.	Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/ <i>New Priok Eastern Access (NPEA)</i>	Provinsi DKI Jakarta
B. Sektor Pelabuhan		
57.	Pelabuhan KEK Maloy	Provinsi Kalimantan Timur
58.	Pelabuhan Sanur - Nusa Ceningan/Lembongan	Provinsi Bali
59.	Pelabuhan Likupang	Provinsi Sulawesi Utara
60.	Makassar <i>New Port</i>	Provinsi Sulawesi Selatan
61.	Terminal <i>Multipurpose</i> Labuan Bajo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
62.	<i>Inland Waterways</i> Cikarang - Bekasi - Laut (CBL)	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
63.	Pembangunan Pelabuhan Patimban	Provinsi Jawa Barat
64.	Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing	Provinsi Kalimantan Barat
65.	Pengembangan Pelabuhan Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
66.	Pengembangan Pelabuhan Sorong Eksisting dan Arar	Provinsi Papua Barat
67.	Pengembangan Pelabuhan Teluk Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
68.	Pengembangan Pelabuhan <i>Hub</i> Internasional Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
69.	Pengembangan Pelabuhan <i>Hub</i> Internasional Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
70.	Pengembangan Pelabuhan Benoa (<i>Bali Maritime Tourism Hub</i>)	Provinsi Bali
71.	Pembangunan Pelabuhan Ambon Baru/ <i>New Ambon</i>	Provinsi Maluku

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
72.	Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/ <i>New Palembang</i> di Tanjung Carat	Provinsi Sumatera Selatan
C. Sektor Bandar Udara		
73.	Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo	Provinsi D.I. Yogyakarta
74.	Bandar Udara Kediri	Provinsi Jawa Timur
75.	Bandar Udara Komodo - Labuan Bajo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
76.	Pengembangan Bandar Udara Internasional Lombok Praya	Provinsi Nusa Tenggara Barat
77.	Pengembangan Bandar Udara Adi Soemarmo	Provinsi Jawa Tengah
78.	Pembangunan Bandar Udara Nabire Baru	Provinsi Papua
79.	Pembangunan Bandar Udara Siboru Fak Fak	Provinsi Papua Barat
80.	Pembangunan Bandar Udara Bali Utara	Provinsi Bali
D. Sektor Kereta		
81.	Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I dari Pengembangan Jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan)	Provinsi Sulawesi Selatan
82.	Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)	Provinsi Sumatera Utara
83.	Kereta Api Purukcahu - Batanjung melalui Bangkuang	Provinsi Kalimantan Tengah
84.	Kereta Api Rantau Prapat - Duri - Pekanbaru	Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau
85.	Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo	Provinsi D.I. Yogyakarta
86.	Kereta Api Jakarta - Surabaya	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur
87.	<i>Double Track</i> Jawa Selatan	Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur
88.	<i>High Speed Railway</i> Jakarta - Bandung	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
89.	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
90.	Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Rel Wilayah Badung - Buleleng	Provinsi Bali
91.	Kereta Api Logistik Lahat - Muara Enim - Prabumulih - Tarahan/Lampung dan Prabumulih - Kertapati/Palembang	Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung
92.	<i>Light Rail Transit</i> (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang)	Provinsi Sumatera Selatan
93.	<i>Light Rail Transit</i> (LRT) Jakarta <i>International Stadium</i> - Kelapa Gading	Provinsi DKI Jakarta
94.	Jakarta <i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) <i>North - South</i> (Bundaran HI - Kota - Ancol Barat)	Provinsi DKI Jakarta
95.	<i>Elevated Inner Loop Line</i> Jatinegara - Tanah Abang - Kemayoran	Provinsi DKI Jakarta
96.	<i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) Jakarta <i>East - West Phase I</i>	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat
E. Sektor Kawasan		
97.	Kawasan Industri Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
98.	Kawasan Industri Landak	Provinsi Kalimantan Barat
99.	Kawasan Industri Ketapang	Provinsi Kalimantan Barat
100.	Kawasan Industri Tanggamus	Provinsi Lampung
101.	Kawasan Industri Jorong	Provinsi Kalimantan Selatan
102.	Kawasan Industri Bantaeng	Provinsi Sulawesi Selatan
103.	Kawasan Industri Morowali	Provinsi Sulawesi Tengah
104.	Kawasan Industri Konawe	Provinsi Sulawesi Tenggara
105.	Kawasan Industri Teluk Bintuni	Provinsi Papua Barat
106.	Kawasan Industri Tanah Kuning	Provinsi Kalimantan Utara
107.	Kawasan Industri Wilmar Serang	Provinsi Banten

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
108.	Kawasan Industri Pulau Obi	Provinsi Maluku Utara
109.	Kawasan Industri Weda Bay	Provinsi Maluku Utara
110.	Kawasan Industri Takalar	Provinsi Sulawesi Selatan
111.	Kawasan Industri Tanjung Enim	Provinsi Sumatera Selatan
112.	Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api	Provinsi Sumatera Selatan
113.	Kawasan Terintegrasi Bakauheni	Provinsi Lampung
114.	Pembangunan Underground Simpang Lima	Provinsi Jawa Tengah
115.	Kawasan Industri Batang	Provinsi Jawa Tengah
F. Sektor Perumahan		
116.	Pembangunan Rumah Susun	Provinsi DKI Jakarta
117.	Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya	Nasional
G. Sektor Bendungan dan Irigasi		
118.	Bendungan Marangkayu	Provinsi Kalimantan Timur
119.	Bendungan Kuningan	Provinsi Jawa Barat
120.	Bendungan Bendo	Provinsi Jawa Timur
121.	Bendungan Gongseng	Provinsi Jawa Timur
122.	Bendungan Tukul	Provinsi Jawa Timur
123.	Bendungan Pidekso	Provinsi Jawa Tengah
124.	Bendungan Tugu	Provinsi Jawa Timur
125.	Bendungan Karalloe	Provinsi Sulawesi Selatan
126.	Bendungan Keureuto	Provinsi Aceh
127.	Bendungan Tapin	Provinsi Kalimantan Selatan
128.	Bendungan Passeloreng	Provinsi Sulawesi Selatan
129.	Bendungan Lolak	Provinsi Sulawesi Utara
130.	Bendungan Bintang Bano	Provinsi Nusa Tenggara Barat
131.	Bendungan Karian	Provinsi Banten
132.	Bendungan Rukoh	Provinsi Aceh

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
133.	Bendungan Way Sekampung	Provinsi Lampung
134.	Bendungan Kuwil Kawangkoan	Provinsi Sulawesi Utara
135.	Bendungan Ladongi	Provinsi Sulawesi Tenggara
136.	Bendungan Ciawi	Provinsi Jawa Barat
137.	Bendungan Sukamahi	Provinsi Jawa Barat
138.	Bendungan Leuwikeris	Provinsi Jawa Barat
139.	Bendungan Cipanas	Provinsi Jawa Barat
140.	Bendungan Tiga Dihaji	Provinsi Sumatera Selatan
141.	Bendungan Semantok	Provinsi Jawa Timur
142.	Bendungan Pamukkulu	Provinsi Sulawesi Selatan
143.	Bendungan Bener	Provinsi Jawa Tengah
144.	Bendungan Sadawarna	Provinsi Jawa Barat
145.	Bendungan Tiro	Provinsi Aceh
146.	Bendungan Lausimeme	Provinsi Sumatera Utara
147.	Bendungan Sidan	Provinsi Bali
148.	Bendungan Marga Tiga	Provinsi Lampung
149.	Bendungan Bagong	Provinsi Jawa Timur
150.	Bendungan Randugunting	Provinsi Jawa Tengah
151.	Bendungan Mbay	Provinsi Nusa Tenggara Timur
152.	Bendungan Bulango Ulu	Provinsi Gorontalo
153.	Bendungan Napungete	Provinsi Nusa Tenggara Timur
154.	Bendungan Temef	Provinsi Nusa Tenggara Timur
155.	Bendungan Way Apu	Provinsi Maluku
156.	Bendungan Meninting	Provinsi Nusa Tenggara Barat
157.	Bendungan Tamblang	Provinsi Bali
158.	Bendungan Beringin Sila	Provinsi Nusa Tenggara Barat
159.	Bendungan Tiu Suntuk	Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
160.	Bendungan Manikin	Provinsi Nusa Tenggara Timur
161.	Bendungan Jlantah	Provinsi Jawa Tengah
162.	Bendungan Jragung	Provinsi Jawa Tengah
163.	Bendungan Sepaku Semoi	Provinsi Kalimantan Timur
164.	Bendungan Budong-Budong	Provinsi Sulawesi Barat
165.	Bendungan Ameroro	Provinsi Sulawesi Tenggara
166.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci	Provinsi Aceh
167.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan	Provinsi Aceh
168.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang	Provinsi Sumatera Selatan
169.	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Baliase	Provinsi Sulawesi Selatan
170.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gumbasa	Provinsi Sulawesi Tengah
171.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang	Provinsi Jawa Barat
172.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Glapan	Provinsi Jawa Tengah
173.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa Telake	Provinsi Kalimantan Timur
174.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lempuing	Provinsi Sumatera Selatan
H. Sektor Air Bersih dan Sanitasi		
175.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat	Provinsi Jawa Tengah
176.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede	Provinsi Jawa Barat
177.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan	Provinsi Jawa Timur
178.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung
179.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur	Provinsi Jawa Barat

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
180.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wasusokas	Provinsi Jawa Tengah
181.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian-Serpong	Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta
182.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro (Bantul, Kulon Progo)	Provinsi D.I. Yogyakarta
183.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng-Kobema (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma)	Provinsi Bengkulu
184.	Sistem Penyediaan Air Baku Bendungan Sidan	Provinsi Bali
185.	Sarana dan Prasarana Air Baku Karian	Provinsi Banten
186.	Jakarta <i>Sewerage System</i> (JSS)	Provinsi DKI Jakarta
I. Sektor Tanggul Pantai		
187.	Tanggul Pantai	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten
J. Sektor Energi		
188.	Kilang Minyak Bontang	Provinsi Kalimantan Timur
189.	Kilang Minyak Tuban (Ekspansi)	Provinsi Jawa Timur
190.	<i>Upgrading</i> Kilang-Kilang Eksisting/ <i>Refinery Development Master Plan</i> (RDMP)	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Selatan
191.	<i>Upgrading</i> Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan	Provinsi Jawa Barat
192.	Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM	Indonesia Bagian Timur
193.	Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG	Indonesia Bagian Timur
194.	Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela	Provinsi Maluku
195.	Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gehem, dan Bangka (Indonesia <i>Deepwater Development Project/IDD</i>)	Provinsi Kalimantan Timur
196.	Proyek Tangguh LNG <i>Train 3</i>	Provinsi Papua Barat

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
197.	Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru	Provinsi Jawa Timur
198.	Pembangunan Jaringan Gas Kota	Nasional
199.	Pembangunan Transmisi Pipa Gas (Ruas Cirebon - Semarang, Ruas KEK Sei Mangkei - Dumai, dan Ruas <i>West Natuna Transportation System</i> - Pemping)	Provinsi Jawa Barat - Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Utara - Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau
200.	Gasifikasi Batu Bara di Tanjung Enim	Provinsi Sumatera Selatan
201.	Pembangunan Fasilitas <i>Coal to Methanol</i> di Kutai Timur	Provinsi Kalimantan Timur
202.	Pembangunan Bahan Bakar Hijau (<i>Green Diesel Bio Refinery Revamping</i> RU IV Cilacap, RU III Plaju <i>Green Refinery</i> , Hidrogenasi CPO PT. Pusri Palembang, Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek)	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Barat
K. Sektor Teknologi		
203.	Percepatan Pembangunan <i>Technopark</i>	Nasional
204.	Proyek Satelit Multifungsi	Orbit
205.	Pengembangan Drone <i>Male</i> Kombatan (<i>Male Unmanned Combat Aerial Vehicle</i>)	Nasional
206.	Pengembangan Teknologi Produksi IVO dan Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang Terintegrasi dengan Kebun Rakyat	Nasional
207.	Pengembangan Industri Garam	Nasional
L. Sektor Pendidikan		
208.	Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia	Provinsi Jawa Barat

II. PROGRAM

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
1.	Program Ketenagalistrikan	Program Ketenagalistrikan terdiri dari: a. Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) (daftar proyek diatur dalam Peraturan

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
		<p>Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan);</p> <p>b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Nasional; dan</p> <p>c. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Skala Besar di Batam.</p>
2.	Program Pemerataan Ekonomi	Percepatan Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Perhutanan Sosial, Reforma Agraria, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dan Peremajaan Kebun Rakyat.
3.	Program Pengembangan Kawasan Perbatasan	10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Jalan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Pararel Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara dan Jalan Akses Perbatasan Kalimantan Utara.
4.	Program Pengembangan Jalan Akses <i>Exit Toll</i>	58 lokasi Exit tol pada 10 Provinsi.
5.	Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Fokus lokasi di DPSP Danau Toba, DPSP Borobudur, DPSP Mandalika, DPSP Labuan Bajo, dan DPSP Likupang.
6.	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
7.	Program Pembangunan <i>Smelter</i>	<p>Program Pembangunan <i>Smelter</i> terdiri dari:</p> <p>a. Pembangunan 14 (empat belas) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PT Ang And Fang Brother di Morowali, Sulawesi Tengah; 2) PT Artabumi Sentra Industri di Morowali, Sulawesi Tengah; 3) PT Sulawesi Resources di Morowali, Sulawesi Tengah;

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
		<p>4) PT Wanxiang Nickel Indonesia di Morowali, Sulawesi Tengah;</p> <p>5) PT Artha Mining Industry di Bombana, Sulawesi Tenggara;</p> <p>6) PT Bintang Smelter Indonesia di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara;</p> <p>7) PT Sungai Raya Nickel Alloy Indonesia di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara;</p> <p>8) PT Ceria Nugraha Indotama di Kolaka, Sulawesi Tenggara;</p> <p>9) PT Macika Mineral Industri di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara;</p> <p>10) PT Virtue Dragon Nickel Industry di Konawe, Sulawesi Tenggara;</p> <p>11) PT Sinar Deli Bantaeng di Bantaeng, Sulawesi Selatan;</p> <p>12) PT Aneka Tambang P3FH di Halmahera Timur, Maluku Utara;</p> <p>13) PT Aneka Tambang Niterra Haltim di Halmahera Timur, Maluku Utara; dan</p> <p>14) PT Teka Mining Resources di Halmahera Tengah, Maluku Utara.</p> <p>b. Pembangunan 5 (lima) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Bauksit oleh:</p> <p>1) PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, Kalimantan Barat;</p> <p>2) PT Dinamika Sejahtera Mandiri di Sanggau, Kalimantan Barat;</p> <p>3) PT Kalbar Bumi Perkasa di Sanggau, Kalimantan Barat;</p> <p>4) PT Laman Mining di Ketapang, Kalimantan Barat; dan</p> <p>5) PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (ekspansi) di Ketapang, Kalimantan Barat.</p>

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
		<p>c. Pembangunan 2 (dua) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Tembaga oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur; dan 2) PT Amman Mineral Industri di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. <p>d. Pembangunan 1 (satu) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Pasir Besi dan Vanadium oleh PT Alchemist Metal Industry di Halmahera Utara, Maluku Utara.</p>
8.	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional/ <i>Food Estate</i>	Daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional Melalui Pengembangan Kawasan <i>Food Estate</i> .
9.	Program Pengembangan <i>Superhub</i>	Bali - Nusa Tenggara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Integrasi PT Pelindo I, PT Pelindo III, dan PT Pelindo IV ke dalam PT Pelindo II.
10.	Program Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan	<p>Program terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang; b. Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, dan

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
		c. Percepatan Pengembangan Wilayah Lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



A. Ktut Hadi Priatna
NIP 197405071999031002